

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pengujian data karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, tingkat kemakmuran (*wealth*), dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda menunjukkan hasil adalah sebagai berikut:

1. Ukuran (*size*) pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset yang besar maka semakin baik kinerja keuangan daerah tersebut.
2. Tingkat kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Jumlah dan kenaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah, namun pada kenyataannya di Pulau Sumatera tidak berpengaruh.
3. *Intergovernmental Revenue* pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Dana Perimbangan di Pulau Sumatera dapat mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah sehingga mempengaruhi kinerja pemerintah dalam pengelolaan daerahnya.
4. Ukuran (*size*) pemerintah daerah, tingkat kemakmuran (*wealth*), dan *intergovernmental revenue* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini

berarti ketiga variabel tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, hasil simpulan diatas menjadi dasar bagi peneliti untuk mengajukan saran bagi pemerintah daerah indonesia umumnya, dan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera pada khususnya untuk dapat lebih meningkatkan kinerja keuangannya dari segi ukuran (*size*) pemerintah daerah, tingkat kemakmuran (*wealth*), dan *intergovernmental revenue*.
2. Pemerintah wajib mempublikasikan transparansi realisasi anggaran seperti laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang tepat dan akurat bagaimana alokasi dari APBD setiap daerah sebenarnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel seluruh kabupaten/kota atau seluruh provinsi dengan menambahkan tahun pengamatan sebelumnya, sehingga hasil penelitian dapat merealisasikan kondisi pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia dari tahun ke tahun.